

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian bagian pendahuluan dalam penelitian. Uraian pendahuluan tersebut meliputi (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah penelitian, (3) tujuan penelitian, dan (4) manfaat penelitian.

1.1 Latar Belakang

Peristiwa komunikasi akan efektif jika berhasil menerapkan prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip dasar komunikasi yang dapat diterapkan misalnya prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan atau kesopanan. Prinsip kerja sama bersifat kooperatif. Prinsip kerja sama harus dilakukan oleh penutur dan mitra tutur, agar proses berkomunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Apabila kedua pelaku komunikasi tidak menggunakan prinsip kerja sama dalam berkomunikasi, akan terjadi kesalahpahaman komunikasi antarpeserta tutur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wijana (1996:46) secara ringkas dapat diasumsikan bahwa ada semacam prinsip kerja sama yang harus dilakukan pembicara dan lawan bicara agar proses komunikasi itu berjalan dengan lancar. Grice (dalam Putrayasa, 2015:102) menyatakan prinsip kerja sama menyangkut maksim kuantitas (*maxim of quantity*), maksim kualitas (*maxim of quality*), maksim relevansi (*maxim of relevance*), dan maksim pelaksanaan (*maxim of manner*).

Berkaitan dengan prinsip kesopanan, menurut Yule (2014:104) kesopanan dikatakan sudah lazim apabila diperlakukan sebagai suatu konsep yang tegas,

seperti gagasan tingkah laku sosial yang sopan dan etika yang terdapat dalam budaya. Hal ini dimungkinkan untuk menentukan sejumlah prinsip-prinsip umum yang berbeda agar menjadi sopan pada interaksi sosial dalam suatu budaya khusus. Sebagian dari prinsip-prinsip ini termasuk sifat bijaksana, pemurah, rendah hati, dan simpatik kepada orang lain. Leech (dalam Putrayasa, 2015:108) menyatakan prinsip kesopanan meliputi maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian.

Peristiwa komunikasi yang menerapkan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan ini dapat diamati dalam pesta demokrasi Indonesia pada 17 April 2019. Pergantian pemimpin dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada saat itu. Pemilihan umum tersebut dilakukan untuk menentukan Presiden, DPRRI, DPR, DPRD, dan DPD. Pemilihan umum yang serentak ini cukup memberikan euforia bagi warga Indonesia karena banyak kandidat yang ada dan berkampanye untuk mencapai kemenangannya. Namun, dari kelima jenis pemilihan itu, yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah pemilihan Presiden Republik Indonesia.

Salah satu hal yang sangat menyita perhatian publik adalah pada tahap debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kedua pasangan capres dan cawapres pada tahap debat saling beradu argumentasi guna memaparkan visi, misi, program, dan wawasannya. Hal ini menarik perhatian publik karena debat tersebut dapat memberikan gambaran umum mengenai

wawasan capres dan cawapres serta memberi gambaran sosok yang kiranya dapat ditunjuk sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Hendrikus (1991:120) menyatakan bahwa debat adalah saling adu argumentasi antarpribadi atau antarkelompok dengan tujuan mencapai kemenangan untuk satu pihak. Debat merupakan salah satu peristiwa komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Debat juga bertujuan untuk mencapai kemenangan dalam suatu hal. Tujuan debat pada umumnya adalah usaha untuk mencapai kemenangan. Adapun kemenangan tersebut berkaitan dengan kemenangan yang bersifat politis. Debat dalam politik sering digunakan sebagai bahan kampanye dalam pemilu. Penggunaan debat sebagai bahan kampanye secara umum bertujuan untuk memberikan informasi terkait visi dan misi kandidat melalui mekanisme debat antarpasangan dalam pemilu.

Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih peserta pemilu. Debat merupakan bahan kampanye yang cukup efektif untuk meyakinkan para pemilih. Melalui debat, kandidat dalam pemilu mampu menawarkan visi, misi, program, serta wawasannya kepada publik.

Penerapan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan dapat dilihat dalam peristiwa komunikasi debat Pilpres 2019. Debat sebagai wujud kegiatan berbicara tidak terlepas dari prinsip yang terdapat dalam peristiwa komunikasi. Di dalam berbicara, baik penutur maupun mitra tutur menyadari bahwa ada kaidah-kaidah

yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan. Setiap peserta tindak tutur bertanggung jawab terhadap tindakan dan penyimpangan terhadap kaidah kebahasaan di dalamnya. Selain itu, saat pelaksanaannya, pelibat debat berargumentasi dan akan memiliki interpretasi makna yang disesuaikan dengan konteksnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Cummings (2007:6) yang menyatakan bahwa orang-orang yang berargumentasi secara rutin akan meninggalkan premis-premis yang tersirat dengan harapan bahwa premis-premis ini dapat disusun kembali berdasarkan konteks argumentasi.

Ir. Joko Widodo dapat dijadikan tokoh sentral dalam debat Pilpres 2019. Dikatakan demikian karena pada saat itu pula Ir. Joko Widodo masih memegang jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai tokoh yang sudah pernah memimpin negara, masyarakat tentu memiliki titik fokus pada penguasaan pengetahuan serta tuturannya. Hal ini akan menjadi sebuah bahan pertimbangan masih atau tidaknya Ir. Joko Widodo bisa dipilih kembali sebagai presiden di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri pula, fenomena yang ada adalah Ir. Joko Widodo memiliki sejumlah prestasi sekaligus cercaan dari masyarakat Indonesia.

Peristiwa berbahasa dalam debat erat kaitannya dengan kekuasaan demi mencapai tujuan politik, yakni mengambil simpati masyarakat untuk memenangkan pemilihan presiden. Kualitas pengetahuan dan komunikasi Ir. Joko Widodo dapat diketahui melalui debat Pilpres 2019 ini. Hal tersebut dapat disimak dalam setiap jawaban Ir. Joko Widodo ketika menjawab pertanyaan yang muncul, baik itu pertanyaan yang dikeluarkan moderator maupun dari pihak

lawan. Misalnya pada debat sesi pertama yang bertema “Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme” moderator membacakan pertanyaan “Di masyarakat, kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan HAM. Dalam konteks seperti apa ketegasan penegakan hukum harus dikedepankan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian? Jawaban harap merujuk pada kasus-kasus konkrit agar dapat secara jelas menggambarkan masalah yang sedang dihadapi.”.

Adapun jawaban Ir. Joko Widodo “Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu bukan pelanggaran HAM, misalnya penahanan tersangka. Memang itu merampas kemerdekaan seseorang. Tapi, penegakan hukum itu melindungi masyarakat. Jadi, kalau ada tersangka korupsi misalnya ditahan, itu bukan pelanggaran HAM. Itu adalah prosedur hukum yang memang harus dilakukan dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti, yang kedua mungkin tersangka tidak melarikan diri. Dan jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur, ya silahkan. Ada mekanisme yang bisa ditempuh lewat pra peradilan misalnya. Jadi, jangan dipertentangkan antara penegakan hukum dan HAM.”.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa jawaban yang diberikan oleh Ir. Joko Widodo dapat dikatakan berkualitas karena menuntaskan semua pertanyaan moderator dengan penjelasan yang tepat mengenai penindakan hukum dan HAM. Ir. Joko Widodo berpendapat bahwa keduanya adalah hal berbeda yang tidak boleh dipertentangkan karena penegakan hukum memiliki

prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan kepada seorang tersangka. Dalam jawaban itu pula, Ir. Joko Widodo telah memberikan contoh kasus konkrit, yaitu kasus korupsi. Memang sepatutnya korupsi harus diberantas demi kesejahteraan masyarakat walaupun menghilangkan kebebasan tersangkanya karena tindakan korupsi menyalahi aturan negara.

Kutipan pendapat yang diberikan oleh Ir. Joko Widodo tersebut termasuk dalam penerapan prinsip kerja sama maksim kualitas, yaitu jawaban atau respons hendaknya didasarkan pada bukti yang memadai. Masih banyak tuturan yang dapat dianalisis dalam debat ini. Sebagian besar, tuturan Ir. Joko Widodo menerapkan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan dalam debat. Hal itu membuktikan bahwa prinsip dasar diterapkan dalam mengeluarkan isi pengetahuan sekaligus melancarkan tujuan komunikasi, sehingga dapat dijadikan sebuah referensi oleh masyarakat yang ingin memilih Ir. Joko Widodo kembali sebagai Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pada kesempatan ini akan dibahas mengenai analisis prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan pada tuturan Ir. Joko Widodo saat pelaksanaan debat Pilpres 2019. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan yang ada dalam tuturan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penerapan prinsip kerja sama dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019?

2. Bagaimanakah penerapan prinsip kesopanan dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditentukan tujuan dari penelitian sebagai berikut ini.

1. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kerja sama dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kesopanan dalam tuturan Ir. Joko Widodo pada video debat Pilpres 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi beberapa pihak seperti berikut ini.

- 1) Bagi dosen, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, khususnya kepada pengajar linguistik yang berkaitan dengan pragmatik.
- 2) Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan materi pembelajaran bahasa, khususnya dalam bidang pragmatik, mengenai prinsip kerja sama dan prinsip kesopanan.
- 3) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian sejenis pada bidang pragmatik.

